

Judul : Wacana Bulog & Bapanas jadi kementerian,persoalan tata kelola pangan bakal diatasi
Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Wacana Bulog & Bapanas Jadi Kementerian **Persoalan Tata Kelola Pangan Bakal Teratasi**

Senayan meminta wacana penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian dikaji secara komprehensif dan mendalam.

ANGGOTA Komisi IV DPR Hindun Anisah mengatakan, penggabungan Bulog dan Bapanas itu menimbulkan persoalan dalam tata kelola pangan nasional. "Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani," ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, ada usulan agar Bapanas dan Bulog dijadikan satu kementerian. Dengan peningkatan status itu, Bulog dan Bapanas independen melakukan distribusi beras sehingga tidak terhambat banyak birokrasi.

Hindun melanjutkan, penggabungan Bulog dan Bapanas menjadi kementerian bisa memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional. Juga mempercepat respons terhadap krisis pangan dan stabilisasi harga, serta memperjelas rantai komando

dari hulu hingga hilir dalam distribusi pangan.

Namun, ia mengingatkan potensi kerugian dan tantangan yang perlu diantisipasi. Sebab bila tidak disiapkan secara matang, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi yang justru memperlambat kinerja di lapangan. "Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru," tegas politikus PKB ini.

Hindun bilang, Pemerintah harus tetap fokus memperbaiki distribusi beras nasional. Rantai distribusi yang efisien adalah kunci agar harga beras stabil dan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. "Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional," kata dia mengingatkan.



Hindun Anisah

Sementara, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyambut positif langkah Pemerintah yang tengah mengkaji usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi setara kementerian atau lembaga. Transformasi tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global.

"Bulog sudah saatnya dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai pengendali cadangan pangan nasional sekaligus penyangga harga," kata Firman dalam ket-

rangannya, Senin (13/10/2025).

Firman mengatakan, penguatan struktural Badan Pangan dan Bulog menjadi setara kementerian akan memangkas rantai birokrasi distribusi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis di bidang pangan.

Firman juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengkaji agar Bulog dikembalikan pada peran strategisnya seperti di masa Orde Baru. Karena inilah momentum yang tepat untuk melakukan transformasi kelembagaan Bulog agar dapat bekerja lebih cepat dan efektif. "Tanpa terjerat birokrasi panjang maupun intervensi berlebihan dari berbagai pihak," kata politikus Golkar ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah sedang mengkaji usulan dari DPR untuk menaikkan status Perum Bulog dan Bapanas menjadi setara kementerian atau lembaga.

"Pemerintah terus berupaya memperkuat peran Bulog, terutama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan," ujar

Prasetyo usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (12/10).

Prasetyo mengatakan, suntikan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) kepada Perum Bulog senilai Rp 16,6 triliun pada awal 2025 terbukti membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.

Pada Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia Merdeka. Ini menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan. "Alhamdulillah kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," politikus Gerindra ini

Prasetyo menegaskan, Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional. Sehingga semua pihak harus bekerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan. "Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya *Insha Allah* aman," pungkasnya. ■ TIF